



Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung UMKM di Indonesia

Alvin Syahri, Syifa Putri Dewi Wahid, Nur Wahid, Shava Azzahra

Universitas Cakrawala

alvin.waws@gmail.com ; syifaputri.dw@gmail.com ; nurwahid404@gmail.com;

shavazzhr@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah Artikel : Diterima November 2024 Revisi Desember 2024 Dipublikasikan Januari 2025 Keywords : Pancasila Kewarganegaraan Undang-undang Perdagangan UMKM Bisnis	Artikel ini menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan yang mengatur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia, tercermin dalam regulasi yang mendukung UMKM. Dengan menggunakan metode studi literatur, kajian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan telah diakomodasi melalui kebijakan insentif pajak, akses permodalan, dan perlindungan usaha kecil, meskipun implementasinya menghadapi kendala seperti birokrasi yang rumit dan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi UMKM berkontribusi pada upaya pemerataan ekonomi, namun efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui penyederhanaan birokrasi dan penguatan sosialisasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan meningkatkan regulasi UMKM yang lebih efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
How to Cite : Syahri dkk., (2025). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung UMKM di Indonesia. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 10(1), pp. 43-50. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v10.n1.2025.pp43-50	ABSTRACT <i>This article analyzes the implementation of Pancasila values in government policies regulating Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia.</i> The study aims to identify the extent to which Pancasila principles, such as social justice, humanitarianism, and national unity, are reflected in regulations supporting MSMEs. Using a literature review method, this study examines relevant legislation, academic journals, and other pertinent documents. The findings reveal that the principles of social justice and humanitarianism are accommodated through policies such as tax incentives, access to capital, and protection for small businesses. However, implementation challenges remain, including complex bureaucracy and a lack of awareness among business actors regarding these regulations. The study concludes that integrating Pancasila values into MSME regulations contributes to economic equity. Nonetheless, effectiveness can be improved through streamlined bureaucratic processes and enhanced policy socialization. This research is expected to provide insights for policymakers in evaluating and improving MSME regulations to better align with Pancasila principles, thereby fostering equitable economic growth.
✉ Alamat korespondensi:	
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cakrawala, DKI Jakarta, Indonesia	
✉ E-mail:	
alvin.waws@gmail.com	

Copyright © 2025 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor utama yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, karena memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan

penyediaan lapangan kerja sehingga dapat mensejahterakan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Mayoritas UMKM di Indonesia adalah bisnis rumahan yang berperan dalam menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Menurut data resmi dari Kementerian Koperasi

dan UKM, pada tahun 2019 tercatat ada sekitar 65,4 juta UMKM di Indonesia. Jumlah tersebut berhasil menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 123,3 ribu tenaga kerja. Data ini menunjukkan betapa signifikan kontribusi dan dampak yang dihasilkan oleh UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Keberhasilan UMKM tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan usaha kecil ini. Dalam konteks ideologi dan pandangan hidup bangsa negara Indonesia, regulasi tersebut harus mencerminkan nilai-nilai dasar negara yang terdapat dalam Pancasila. Seperti yang sudah diketahui, pancasila menjadi landasan utama seluruh hukum di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Sesuai peraturan pemerintahan, Pancasila berperan sebagai sumber hukum yang mengatur NKRI beserta seluruh unturnya, termasuk pemerintah, wilayah, dan rakyat (Auliaurrahman dkk., 2024). Pancasila menekankan prinsip persatuan, keadilan sosial, serta kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai fondasi kebijakan publik. Untuk memastikan bahwa regulasi bisnis UMKM tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi tetapi juga bentuk perwujudan kesetaraan dan keadilan sosial, implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi penting. Meskipun pada praktiknya implementasi hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, hambatan utama sering kali meliputi korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakpastian hukum. Selain itu, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang dirumuskan dan penerapannya di lapangan (Auliaurrahman dkk., 2024).

Pemerintah memegang peranan penting dalam mengatur dan menjaga keseimbangan pasar, sehingga tidak jatuh ke tangan individu atau kelompok tertentu yang mencerminkan sistem individualisme dan liberalisme, yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat merata bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, dalam membangun sistem ekonomi, perlindungan terhadap usaha ekonomi rakyat menjadi prioritas agar mampu bertahan dan tidak kalah bersaing dengan usaha besar di pasar. Sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Demokrasi Ekonomi, ditegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diberdayakan

sebagai elemen penting dalam perekonomian rakyat. UMKM memiliki posisi, peran, serta potensi strategis untuk membangun struktur perekonomian nasional yang lebih maju dan berkeadilan (Dharmajaya dkk., 2023). Di samping itu, pemerintah telah mengeluarkan bermacam-macam regulasi untuk mendukung UMKM, namun tetap masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua regulasi sudah sesuai dengan pedoman hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ketidaksesuaian antara kebijakan yang diputuskan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu masalah utama. Tidak seimbangnya akses terhadap fasilitas usaha yang sudah disediakan negara, yang cenderung disalahgunakan oleh para petinggi instansi terkait, kurangnya pendampingan yang memenuhi standard, dan hambatan birokrasi sering kali menjadi kesulitan bagi para pelaku UMKM untuk berkembang. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah benar-benar direalisasikan dalam kebijakan regulasi UMKM.

Upaya dukungan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap UMKM sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inisiatif ini membuka peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan bersaing, khususnya dengan perusahaan yang lebih fokus pada penggunaan modal besar (*capital intensive*). Oleh sebab itu, pemberdayaan UMKM harus dilaksanakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui penciptaan iklim usaha yang mendukung, penyediaan peluang yang setara, perlindungan usaha, serta pengembangan yang lebih luas. Upaya ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, yang semuanya mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan keadilan sosial (Dharmajaya dkk., 2023).

Namun, agar pemberdayaan ini berjalan efektif, diperlukan penguatan instrumen regulasi yang sesuai dengan sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Regulasi yang kuat dan berpihak pada UMKM akan memperkuat perannya dalam peningkatan ekonomi masyarakat, selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penerapan nilai-

nilai Pancasila dalam regulasi bisnis UMKM dan dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Analisis ini akan mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan, telah direalisasikan dalam regulasi tersebut serta efeknya terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan kontribusi ekonomi nasional. Hasil karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberi kontribusi maksimal dan bermanfaat baik secara akademik maupun praktis. Setelah dikaji, secara akademis, karya tulis ilmiah ini mampu memperluas pemahaman tentang kaitan antara nilai-nilai Pancasila dengan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara itu, secara praktis, karya ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan selaras dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Dengan demikian, regulasi bisnis UMKM dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi bisnis UMKM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Studi literatur ini melibatkan penelusuran berbagai sumber sekunder, termasuk undang-undang, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, yaitu metode sistematis untuk menganalisis informasi yang terdapat dalam berbagai sumber sekunder yang relevan. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis data dari dokumen resmi, jurnal akademik, buku, dan sumber lain yang relevan dengan topik penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi UMKM. Langkah-langkah desain penelitian ini mencakup:

Pertama, identifikasi Literatur: Mengumpulkan dokumen kebijakan dan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, serta kebijakan terkini dari Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, jurnal ilmiah dan artikel akademik tentang

penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi juga dianalisis

Kedua, seleksi literatur: Literatur yang dipilih diseleksi berdasarkan relevansi, validitas, dan keandalan sumber. Literatur yang dianalisis difokuskan pada kebijakan dan regulasi yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan kemanusiaan

Ketiga, analisis literatur: Literatur yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi hubungan antara penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi UMKM dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis tematik digunakan untuk mengkategorikan data sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Keempat, sintesis hasil: data yang diperoleh disintesis untuk memberikan gambaran holistik mengenai bagaimana regulasi UMKM mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan dampaknya pada sektor UMKM di Indonesia.

Pendekatan studi literatur ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam dari berbagai perspektif akademik dan kebijakan sehingga dapat memberikan dasar yang kuat untuk mendukung analisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi UMKM

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: studi pustaka terkait pandangan pengkaji/penulis ahli mengenai penerapan pemerintah dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dalam regulasi UMKM; penelitian ini membatasi analisis pada regulasi yang dikeluarkan dalam periode 2015-2024, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, dan kebijakan terkait pemberdayaan UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Teknik Pengumpulan dan Analisis data

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dilakukan terhadap kebijakan utama yang memiliki dampak signifikan pada pemberdayaan UMKM, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan kebijakan terkini dari Kementerian Koperasi dan UKM. Referensi kebijakan ini dicantumkan dalam daftar pustaka untuk memastikan transparansi. Penelusuran jurnal, artikel, dan referensi lain yang relevan. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis, dan tahapan analisis meliputi:

Identifikasi nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam dokumen regulasi UMKM;

evaluasi relevansi dan efektivitas regulasi dalam mendukung prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab.; dan pengujian hubungan sebab-akibat antara regulasi yang diterapkan dengan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan UMKM,

Dengan melalui pendekatan metode ini, artikel ilmiah ini diharapkan dapat memberi kontribusi signifikan dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait UMKM dan mengarahkan regulasi ke arah yang lebih berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah Indonesia telah menghasilkan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan pelaku usaha kecil, karena UMKM merupakan fondasi perekonomian Indonesia maka UMKM memerlukan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi cita-cita Pancasila sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait hal tersebut, penerapan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan UMKM oleh pemerintah mencakup sejumlah unsur yang berkaitan dengan keadilan sosial, perikemanusiaan, kesetiakawanan, dan gotong royong. Keharusan moral dan etika dalam setiap kebijakan publik, termasuk peraturan perundang-undangan usaha UMKM yang diajarkan dalam nilai - nilai Pancasila. Kesetaraan dan pemerataan dalam penerapan regulasi UMKM baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dalam situasi ini, langkah-langkah seperti bantuan modal, subsidi, dan dukungan teknologi harus disebarakan secara merata dan tanpa bias. Salah satu kebijakan penting adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM dengan total plafon mencapai Rp373,17 triliun pada tahun 2022. Program ini merefleksikan sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," dengan tujuan mendukung pemerataan kesejahteraan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Untuk memastikan bahwa pekerja di sektor UMKM diperlakukan secara adil dan tepat, aturan juga harus melindungi hak-hak mereka. Penghormatan terhadap martabat manusia, yang merupakan inti dari asas kedua, tercermin dalam hal ini. Aturan UMKM harus

mampu meningkatkan integrasi sosial dan ekonomi di seluruh negeri dalam kerangka Persatuan Indonesia. Kebijakan yang mendorong barang-barang lokal dari berbagai daerah untuk bersaing di pasar domestik dan luar negeri dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan demikian, UMKM dapat memberikan kontribusi yang sama terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, implementasi program digitalisasi UMKM telah meningkatkan partisipasi pelaku usaha kecil dalam ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan peluang peningkatan pendapatan hingga 30% bagi UMKM yang telah beralih ke platform online. Hal ini mencerminkan sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," karena mendukung kolaborasi dan inklusi ekonomi (Juwantini dkk., 2021).

Namun, tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah ketimpangan akses sumberdaya antara UMKM di perkotaan dan pedesaan. Penelitian menemukan bahwa 45% UMKM di daerah terpencil masih menghadapi kendala infrastruktur, seperti akses internet dan teknologi. Ketimpangan ini menunjukkan kurang optimalnya penerapan sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," karena sebagian pelaku usaha belum mendapatkan kesempatan yang setara (Era dkk., 2022).

Upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut terlihat dalam pelatihan berbasis digital yang diselenggarakan oleh dinas UMKM di berbagai daerah. Pelatihan ini telah meningkatkan keterampilan 70% peserta dalam memanfaatkan teknologi untuk pemasaran produk. Hal ini mencerminkan sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," karena pelaksanaan program didasarkan pada kebutuhan masyarakat lokal (Pradani dkk., 2023).

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi bisnis UMKM menunjukkan hasil positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kecil. Namun, untuk mencapai implementasi yang optimal, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menyesuaikan kebijakan agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam menghadapi tantangan kapitalisme global.

Dengan fokus pada literatur terkait regulasi UMKM, analisis ini menyoroti kebijakan utama yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hukum dan moral dalam pembangunan ekonomi nasional.

Analisis difokuskan pada kebijakan-kebijakan utama berikut: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menjadi landasan utama dalam mendefinisikan dan mengatur hak serta kewajiban pelaku UMKM;

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang memberikan detail tentang dukungan akses pembiayaan, digitalisasi, dan penguatan kapasitas usaha; dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai wujud konkret dari implementasi sila kelima Pancasila melalui pemberian akses permodalan dengan bunga rendah bagi UMKM.

Berikut ini adalah pembahasan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi UMKM yang disusun pemerintah.

Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Regulasi UMKM.

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai luhur yang menanamkan rasa hormat terhadap keberagaman agama dan mengakui keberadaan Tuhan. Konsep ini dituangkan dalam regulasi UMKM melalui langkah-langkah yang menjunjung tinggi etika perusahaan dan keyakinan agama. Pemerintah mendorong para pelaku UMKM untuk menjalankan kegiatan usahanya secara etis, seperti tidak melakukan produksi barang atau jasa yang bertentangan dengan moral masyarakat dan norma agama.

Regulasi UMKM di Indonesia mencerminkan nilai ini dengan mendorong pelaku usaha untuk menjaga etika bisnis sesuai dengan norma agama dan nilai moral bangsa.

Beberapa implementasi yang terlihat dalam regulasi UMKM mencakup: □

Penerapan prinsip halal dan etika bisnis: Pemerintah memberikan sertifikasi halal untuk produk-produk UMKM, terutama makanan dan minuman, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama.

Insentif usaha berbasis religiusitas: Pemerintah mendukung pengembangan usaha yang berkontribusi pada nilai moral masyarakat, seperti usaha berbasis lingkungan dan sosial.

Pelatihan berbasis etika agama: Dinas terkait sering mengadakan pelatihan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga

pada nilai-nilai etika bisnis yang berlandaskan prinsip Ketuhanan.

Implementasi ini menunjukkan bahwa regulasi UMKM tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai spiritual yang memperkuat fondasi moral dalam perekonomian.

Keabsahan beberapa kebijakan pemerintah terkait nilai-nilai agama dalam usaha UMKM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Keabsahan beberapa kebijakan pemerintah terkait nilai-nilai agama

Kebijakan	Implementasi Nilai Ketuhanan	Dampak pada UMKM
Larangan produksi barang ilegal	Meningkatkan kepatuhan terhadap norma agama dan hukum	Bisnis UMKM lebih kredibel dan etis
Penyediaan pelatihan etika bisnis	Membangun kesadaran religius dalam praktik usaha	Peningkatan kepercayaan pelanggan
Insentif untuk produk halal dan ramah lingkungan	Mendorong inovasi berbasis nilai agama	UMKM memiliki keunggulan kompetitif

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam UMKM

Prinsip ini tercermin dalam regulasi yang menjamin perlindungan terhadap hak buruh UMKM, seperti ketentuan tentang upah layak dan jaminan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelatihan keterampilan berbasis gender berhasil meningkatkan keterlibatan perempuan hingga 25% di sektor UMKM (Pradani dkk., 2023). Bagi UMKM Prinsip kemanusiaan sangat mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk bagi pelaku UMKM dan karyawannya. Nilai ini diwujudkan dalam aturan UMKM melalui kebijakan yang memperhatikan kelompok rentan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak buruh. Peraturan yang ditetapkan pemerintah menjamin bahwa karyawan di sektor UMKM memiliki hak yang sama, termasuk kompensasi yang adil, tempat kerja yang aman, dan prospek pertumbuhan. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam

perekonomian, inisiatif yang memberdayakan perempuan sebagai pelaku UMKM juga terus didukung.

Tabel 2. Keabsahan beberapa kebijakan pemerintah terkait nilai-nilai kemanusiaan

Program	Penerapan nilai kemanusiaan	Hasil yang diharapkan
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perempuan	Memastikan akses modal bagi pengusaha perempuan	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi
Standar kerja layak untuk pekerja UMKM	Melindungi pekerja dari eksploitasi	Kesejahteraan tenaga kerja meningkat
Program pelatihan inklusif	Melibatkan difabel dalam pelatihan bisnis	Kesempatan kerja dan usaha bagi difabel

Persatuan Indonesia dalam peraturan UMKM

Nilai persatuan diaplikasikan melalui digitalisasi UMKM dan promosi produk lokal. Pemerintah mendukung inklusi ekonomi melalui pelatihan digitalisasi yang memungkinkan UMKM bersaing di pasar global. Literasi digital terbukti meningkatkan pendapatan UMKM hingga 30% (Juwantini dkk., 2021). Pentingnya menjaga keutuhan dan keharmonisan negara, termasuk dalam pertumbuhan UMKM, tercermin dalam nilai persatuan. Dengan memajukan UMKM berbasis kearifan lokal, pemerintah berharap dapat mendorong kerja sama daerah. Agar UMKM dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi sekaligus penjaga budaya, pengaturan UMKM mendorong keberagaman barang dan jasa yang mencerminkan budaya Indonesia. Nilai persatuan dimanfaatkan oleh sejumlah inisiatif untuk membangun jaringan perdagangan antardaerah, seperti promosi produk unggulan daerah. Alhasil, UMKM dapat memanfaatkan kegiatan ekonomi untuk memperluas jangkauan pasar dan mendorong persatuan nasional.

Tabel 3. Keabsahan beberapa kebijakan pemerintah terkait nilai-nilai persatuan

Inisiatif	Implementasi	Manfaat
-----------	--------------	---------

Nilai Persatuan

Festival produk lokal	Mempromosikan produk khas dari berbagai daerah	Penguatan ekonomi lokal
Digitalisasi UMKM berbasis budaya	Memasarkan produk lokal ke pasar nasional dan internasional	Peningkatan daya saing global
Program kemitraan antar daerah	Memfasilitasi kerjasama UMKM dari berbagai provinsi	Penguatan jejaring antar pelaku usaha

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Nilai kerakyatan mendorong pengambilan keputusan yang mendorong partisipasi masyarakat. Menurut peraturan UMKM, hal ini dilakukan melalui pendekatan inklusif, di mana anggota UMKM diharapkan untuk berpartisipasi dalam pengembangan hubungan yang saling menguntungkan. Diskusi dan forum asosiasi UMKM merupakan salah satu tempat terbaik untuk menyampaikan aspirasi bisnis. Dalam proses pengajuan, peninjauan, dan penyerahan bantuan kepada UMKM, Pemerintah juga menetapkan akses terhadap informasi dan transparansi.

Tabel 4. Keabsahan beberapa kebijakan pemerintah terkait nilai-nilai kerakyatan

Kebijakan	Penerapan Nilai Kerakyatan	Keuntungan Bagi UMKM
Program partisipasi publik dalam regulasi	Pelaku UMKM dilibatkan dalam penyusunan kebijakan	Kebijakan yang relevan dan aplikatif
Transparansi subsidi dan insentif	Informasi bantuan pemerintah mudah diakses	Mengurangi praktik korupsi
Digitalisasi perizinan usaha	Memper memudahkan pelaku UMKM untuk mendaftar dan mendapatkan izin	Proses lebih cepat dan efisien

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Regulasi UMKM mencerminkan sila kelima dengan memberikan perhatian pada pemerataan akses sumber daya ekonomi. Contohnya, Program KUR yang menyediakan pembiayaan dengan plafon hingga Rp373,17 triliun pada tahun 2022 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Namun, literatur menunjukkan bahwa implementasi ini belum sepenuhnya optimal, khususnya di daerah terpencil. Tantangan seperti minimnya akses internet dan infrastruktur menjadi kendala yang signifikan bagi 45% UMKM di pedesaan (Era dkk., 2022). Pemerataan hasil pembangunan, termasuk akses terhadap peluang ekonomi, ditekankan oleh nilai keadilan sosial. Pemerintah berupaya untuk menetapkan undang-undang yang memfasilitasi akses UMKM terhadap pasar, pendanaan, dan pelatihan. Penerapan prinsip keadilan sosial dicontohkan oleh inisiatif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan keringanan pajak untuk UMKM kecil. Pelaku UMKM dari berbagai tingkat masyarakat dapat meningkatkan standar hidup mereka dan bersaing secara adil dengan pendekatan ini.

Tabel 5. Keabsahan beberapa kebijakan pemerintah terkait nilai-nilai keadilan sosial

Program	Penerapan Nilai Keadilan Sosial	Dampak pada UMKM
Subsidi bunga untuk KUR	Memberikan akses modal dengan bunga rendah	Mendukung ekspansi usaha
Insentif pajak bagi UMKM kecil	Memberikan keringanan pajak untuk usaha dengan omzet tertentu	Beban operasional berkurang
Pelatihan keterampilan berbasis daerah	Memberikan pelatihan sesuai kebutuhan dan potensi lokal	Pengembangan usaha lebih terarah

Pencantuman Pancasila dalam peraturan perundang-undangan UMKM yang dibuat pemerintah tidak hanya menjadi keharusan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun

sistem ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Pemerintah dapat mendukung pertumbuhan UMKM secara menyeluruh dengan tetap menjaga integritas dan kedaulatan ekonomi nasional dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan. Dengan mengadopsi strategi yang berlandaskan pada asas Ketuhanan, kemanusiaan, solidaritas, demokrasi, dan keadilan sosial, peraturan perundang-undangan UMKM berpotensi untuk berperan signifikan dalam mewujudkan negara yang maju dan bermartabat. Diharapkan peraturan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya bagi pelaku UMKM.

Meskipun banyak capaian positif, terdapat tantangan dalam konsistensi penerapan regulasi di berbagai daerah. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM belum mengetahui atau memahami detail kebijakan yang tersedia karena kurangnya sosialisasi. Selain itu, hambatan birokrasi kerap menjadi penghalang untuk akses program seperti KUR dan subsidi pajak. Untuk mengoptimalkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam regulasi UMKM, diperlukan: Penguatan sosialisasi kebijakan, terutama di daerah terpencil, melalui pendekatan berbasis komunitas; digitalisasi layanan pemerintah, seperti perizinan dan pengajuan subsidi, untuk mempermudah akses bagi pelaku UMKM; dan fokus pada pemerataan infrastruktur, khususnya teknologi dan internet, untuk mendorong digitalisasi yang inklusif.

SIMPULAN

Nilai-nilai yang terdapat di Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia, telah tercermin dalam berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pelatihan digitalisasi. Namun, implementasi kebijakan ini tentu saja masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk ketidaksetaraan akses sumber daya antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta hambatan birokrasinya. Dengan pendekatan berbasis literatur, setelah mengevaluasi efektivitas regulasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi Pancasila dalam kebijakan UMKM adalah langkah strategis untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Meskipun ada hasil

yang menunjukkan kemajuan signifikan, masih diperlukan penguatan instrumen regulasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.

Adanya perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang merupakan dukungan pemerintah, perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, diharapkan penerapan nilai-nilai Pancasila pada kebijakan UMKM dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional serta mendorong kebersamaan sebagai dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyelesaian jurnal ini, khususnya kepada para pembimbing, peneliti, dan akademisi yang telah memberikan pandangan serta masukan yang konstruktif, seluruh instansi pemerintah yang telah menyediakan data serta informasi yang relevan, dan tak lupa kepada keluarga serta rekan-rekan yang senantiasa memberikan dukungan moral, motivasi, dan inspirasi selama proses penelitian hingga jurnal ini dapat tersusun dengan baik; semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata, menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat, serta mendorong penguatan regulasi bisnis UMKM dalam bingkai nilai-nilai luhur Pancasila demi kemajuan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliaurrahman, Anshari, N., & Ulfanur, M. (2024). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 2(2), 66–77. <https://doi.org/10.62263/JIS.V2I2.38>
- Dharmajaya, M. A., Haykal, H., Seftiadi, Y., Muhammadiyah Jakarata, U., & Maranatha, U. K. (2023). Penguatan Regulasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 22(2), 164–177. <https://doi.org/10.32639/FOKBIS.V22I2.688>
- Era, K., Marsudi, R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 27–42. <https://doi.org/10.37680/IJIEF.V2I1.1584>
- Juwantini, N., Nisa, L. K., Mariatie, N., & Rachman, T. (2021). Strategi Penerapan Ekonomi Pancasila dalam Pemberdayaan UMKM Menuju Transformasi Era Digital di Masa Pandemi: *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 209–216. <https://doi.org/10.21776/UB.JIAT.2019.005.01.5>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). Melalui Dukungan Kebijakan Ekonomi Nasional bagi UMKM, Pemerintah Dorong Kualitas UMKM agar Go Digital dan Go Global. Dalam *ekon.go.id*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4603/melalui-dukkungan-kebijakan-ekonomi-nasional-bagi-umkm-pemerintah-dorong-kualitas-umkm-agar-go-digital-dan-go-global>
- Pradani, R. F. E., Mufidah, K. M., & Lestari, L. A. (2023). Implementasi Etika Bisnis Berkarakteristik Pancasila pada UMKM Produksi Kerupuk di Desa Pesisir Kecamatan Besuki. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 4(3). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/trilogi/article/view/7213>